

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Kebersihan lingkungan saat ini sangat penting, karena hal ini menyangkut kelangsungan hidup manusia. Masalah kebersihan lingkungan merupakan masalah jangka panjang yang penanganannya memerlukan waktu, usaha, dan tidak dapat diabaikan. Apabila terjadi penundaan atau keterlambatan dalam penanganannya maka akan menyebabkan usaha penanggulangnya menjadi semakin memakan waktu lama dan berat.

Lingkungan yang sehat dan bersih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena lingkungan merupakan tempat hidup semua makhluk yang ada di bumi, khususnya manusia. Dengan adanya lingkungan yang sehat dan bersih maka masyarakat akan merasa nyaman berada di wilayah tersebut, dan lingkungan yang tidak sehat menimbulkan berbagai penyakit yang diakibatkan oleh sampah-sampah, baik itu sampah industri ataupun sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan dan tidak dapat dicegah.

Kebersihan sebuah lingkungan merupakan suatu keadaan yang terbebas dari kotoran seperti, sampah, debu, dan juga bau. Masalah kebersihan lingkungan yang kurang kondusif disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan baiknya kebersihan lingkungan. Salah satunya masalah yang kerap terjadi dan terus menerus adalah sampah. Sampah merupakan sisa dari kegiatan manusia sehari-hari.

Pengelolaan sampah di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Di dalam Undang-Undang disebutkan pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Sedangkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menjelaskan pada pasal 5 bahwa Pemerintah dan Pemerintahan Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) pada dasarnya mempertegas fungsi utama yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah, pengelolaan sampah termasuk pada pembagian urusan pemerintahan konkret di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dengan sub urusan persampahan, dimana dinyatakan bahwa pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Salah satu permasalahan besar yang dialami oleh setiap kota ataupun daerah adalah masalah pengelolaan dan penanganan sampah yang seakan tidak ada habisnya untuk diselesaikan. Dimana sampah semakin hari terus menerus

bertambah, maka dari itu sampah menjadi persoalan yang sangat serius terutama bagi sektor lingkungan hidup. Karena penanganan sampah sangat berhubungan dengan masalah lingkungan hidup yang sangat berdampak dengan kondisi kesehatan dan kebersihan lingkungan.

Terkait permasalahan pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung (DLHK) adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan tugas tersebut. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas pokok pada bidang aspek peningkatan kebersihan, pengelolaan sampah, pengangkutan sampah, dan penataan lingkungan.

Instansi pemerintah pada dasarnya tidak dapat terlepas dari sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Pegawai merupakan unsur aparatur yang secara kelembagaan menjadi bagian terpenting dari manajemen pemerintahan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat merupakan tugas pokok yang menjadi tuntutan harus dilaksanakan dan lebih ditingkatkan kearah yang lebih baik.

Untuk mencapai tujuan dengan baik sesuai dengan program kerja dan rencana yang telah disusun, maka salah satu yang penting adalah kedisiplinan kerja pegawai dalam meaksanakan tugas dan pekerjaannya. Kedisiplinan kerja pegawai terlihat dari bagaimana ketaatan pegawai terhadap peraturan yang

berlaku baik dalam hal pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Oleh karena itu organisasi yang bergerak dalam bidang sosial diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan suatu program layanan pembangunan dalam rangka pemberian suatu bantuan bagi masyarakat. Agar dalam pengelolaan sumber daya manusia dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien maka, harus melaksanakan fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemberian motivasi, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan inovasi. Kinerja yang dilakukan oleh pemerintah baik atau buruk akan sangat berdampak kepada masyarakat.

Menurut Rival, (2012: 6) mengemukakan bahwa:

“kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. “

Sedangkan menurut Mahsun, (2006: 25) mengemukakan bahwa:

“kinerja adalah deskripsi maupun representatif terkait tingkat pencapaian dari suatu program/kegiatan/kebijakan yang dijalankan dalam merealisasikan visi dan misi, sasaran, serta tujuan sebuah organisasi yang pada dasarnya terletak pada perencanaan strategis (strategic planning) dari suatu organisasi. “

Kemudian Menurut Robbins (2012: 5) mengemukakan bahwa:

“kinerja diartikan sebagai hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan individu dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kinerja seseorang sangat diperlukan sebab dengan adanya kinerja akan diketahui seberapa jauh kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugasnya. “

Menurut Undang-Undang ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri maupun masyarakat. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 4 menyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan

Pegawai pada suatu organisasi merupakan sumber utama yang tidak dapat tergantikan oleh sumber daya lainnya, karena bagaimanapun baik dan buruk suatu organisasi, lengkapnya sebuah fasilitas yang tersedia jika tanpa adanya pegawai maka tidak akan bermanfaat suatu organisasi tersebut. Tercapai atau tidaknya tujuan organisasi akan ditentukan oleh sejauhmana pemahaman dan penerimaan pegawai tentang tujuan organisasi.

Tujuan organisasi adalah suatu target yang hendak dicapai oleh suatu organisasi dengan waktu yang telah ditetapkan. Kinerja merupakan bagian yang sangat penting bagi sebuah organisasi, suatu organisasi menginginkan pegawai untuk bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai hasil kerja yang baik, tanpa adanya kinerja yang

baik dari seluruh pegawai, maka suatu keberhasilan untuk mencapai tujuan akan sulit tercapai.

Tujuan akan tercapai jika dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat telah tercapai dengan baik salah satunya dalam pelayanan pengelolaan sampah termasuk kedalam pelayanan publik yang bertujuan untuk melayani masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan. Dalam pelayanan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat sebagai pelanggan. Namun demikian, sering terjadi penanganan sampah perkotaan menjadi tidak efektif akibat keterbatasan pemerintah baik dalam pembiayaan, jumlah personil maupun jumlah peralatan yang tersedia.

Adanya sampah tidak akan terlepas dari aktivitas manusia di berbagai sector. Sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya sebuah proses. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa sampah merupakan barang yang tidak berguna sehingga banyak masyarakat yang membuang sampah tanpa dikelola dengan baik yang menimbulkan pencemaran.

Oleh karena itu sangat dibutuhkan peran dari pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan sebagai lembaga yang berwenang dalam mengelola kebersihan lingkungan agar terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman. Pemerintah juga sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup rakyat Indonesia demi berlangsungnya peningkatan kualitas hidup.

Kegiatan pembangunan yang semakin tahun semakin meningkat tentunya tidak terlepas dari resiko pencemaran dan perusakan lingkungan. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk menjalankan kehidupan. Salah satunya adalah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia akan melakukan kegiatan jual beli dan yang menjadi tokoh utama dalam kegiatan ini adalah pedagang sebagai *supplier* dan pembeli sebagai *costumer*. Tempat yang sering dijadikan tempat jual beli adalah pasar, pasar terbagi menjadi pasar modern dan pasar tradisional. Pasar tradisional memiliki stigma dikalangan masyarakat yaitu kurang bersih dan aman serta nyaman. Keamanan dan kenyamanan ini yang seharusnya menjadi faktor penting saat pembeli ingin melakukan transaksi.

Salah satunya seperti Pasar tumpah andir dan Pasar tumpah sudirman Kota Bandung yang masuk kedalam Bojonegara Zona A (BJ2A). BJ2A adalah kelompok pengelolaan sampah yang ditunjuk langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersih Kota Bandung untuk mengelolaa sampah yang ada di wilayah Pasar tumpah andir sejauh 250m dan Pasar tumpah sudirman sejauh 1,1km. Pegawai pengelolaan sampah Bojonegara Zona 2A (BJ2A) melakukan pengelolaan sampah pada pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan dilakukannya dua kali pengangkutan sampah serta difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dua unit Mobil Angkutan Sampah yang beroperasi mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB.

Pegawai pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung yang menjadi tim pengelolaan sampah Bojonegara Zona 2A dinilai belum optimal karena masih banyaknya sampah yang menumpuk disekitar Pasar tumpah andir dan Pasar tumpah sudirman dan di dominasi sampah pedagang dari aktivitas pedagang dan pembeli ketika Pasar tumpah andir dan Pasar tumpah sudirman beroperasi malam hari, hal tersebut disebabkan oleh pegawai pengelolaan sampah yang kurang optimal dan pengangkutan sampah yang tidak terjadwal seharusnya dilakukan dua kali pengangkutan setiap hari pada pukul 13.00 WIB sampai pukul 18.00 tetapi terkadang hanya dilakukakan sekali pengangkutan dan tidak sesuai dengan jam yang telah ditetapkan seringkali sampah diangkut pada pukul 20.00 WIB ketika Pasar tumpah andir dan Pasar tumpah sudirman sedang beroperasi lalu akibatnya adalah membuat kemacetan dan juga menimbulkan penyumbatan saluran air yang disebabkan oleh sampah yang berserakan lalu menyebabkan genangan hitam yang berbau busuk khas pasar tradisional yang berada diluar ruangan.

Gambar 1.1

Penumpukan sampah di Pasar Tumpah Andir



Sumber: Peneliti, 2023

Gambar 1.2

Penumpukan Sampah di Pasar Tumpah Sudirman



Sumber: Peneliti, 2023

Dengan adanya fenomena tersebut dapat menyebabkan banjir jika terjadi hujan yang cukup lebat dan tidak baik bagi kesehatan. Hal ini sangat mengganggu pedagang dan pembeli yang merasakan rendahnya kenyamanan dan keamanan berjualan di Pasar tumpah andir dan Pasar tumpah sudirman. Salah satunya adalah Pak Agus yang sudah berjualan dari tahun 2015 di Pasar Tumpah Andir, pak agus berdomisili di Jln. Jendral Sudirman Gg.Luna ikut merasakan dampak dari penumpukan sampah tersebut, selain merasa tidak nyaman dengan bau sampah yang menyengat pak agus juga pernah terkena banjir pada tahun 2018 akibat dari sampah yang berserakan disekitaran jalan sehingga jika terjadi hujan lebat maka terjadinya penyumbatan saluran air.

Selain itu, ditemukan juga permasalahan mengenai penggunaan waktu dalam bekerja yang belum optimal dan fasilitas yang kurang memadai ditandai dengan adanya pegawai pengelolaan sampah di lingkungan Pasar tumpah andir dan Pasar tumpah sudirman yang bekerja tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang berlandaskan pada Peraturan Walikota NOMOR 1390 TAHUN 2016. Contohnya adalah banyaknya pegawai yang mengabaikan pengelolaan sampah dengan alasan karena fasilitas yang kurang memadai seperti waktu pengambilan sampah yang tidak terjadwal dan pada kenyataannya mobil pengangkutan sampah hanya tersedia satu mobil saja dikarenakan adanya masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang melebihi kapasitas penyimpanannya sehingga banyak sampah yang tidak terangkut dan menumpuk di sekitaran jalan pasar tumpah andir dan pasar tumpah sudirman serta waktu pengambilan sampah menjadi tidak efektif karena mobil

pengangkut sampah sering datang terlambat akibat menunggu sampah yang sebelumnya terbuang ke TPA.

Maka dari itu perlu adanya pengkajian lebih dalam mengenai kinerja pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul penelitian yaitu “**Analisis Kinerja Pegawai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung (Studi Kasus Bojonegara Zona 2a)**”

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini difokuskan pada kinerja pegawai pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung agar pegawai dapat melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai secara efektif, efisien, dan optimal. Tidak ada lagi masalah penumpukan sampah di sekitar Pasar tumpah andir dan Pasar tumpah sudirman yang mengakibatkan genangan air dan bau tidak sedap, sampah yang berserakan jika terjadi hujan lebat akan mengakibatkan banjir, dan juga terjadinya kemacetan. Dengan demikian permasalahan penumpukan sampah dapat teratasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

Fokus penelitian dibatasi pada penguatan kinerja pegawai. Untuk menganalisis kinerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung menggunakan dimensi John Miner, 2011:11 dalam buku Sudarmanto yang berjudul Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM: Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi (2011:11)

mengemukakan 4 dimensi yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja, yaitu:

- a. Kualitas
- b. Kuantitas
- c. Penggunaan waktu dalam kerja
- d. Kerja sama

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan maka permasalahan yang ditemukan adalah mengenai penggunaan waktu dalam bekerja yang belum optimal dan fasilitas pengelolaan sampah yang kurang memadai ditandai dengan adanya pegawai pengelolaan sampah di lingkungan Pasar tumpah andir dan Pasar tumpah sudirman Kota Bandung yang bekerja tidak sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan.

Ketika jam kerja banyaknya pegawai yang tidak bertanggung jawab dengan pekerjaannya, contohnya adalah banyaknya pegawai pengelolaan sampah yang mengabaikan pengelolaan sampah dengan alasan fasilitas yang kurang memadai tidak seperti seharusnya diangkut oleh dua mobil angkutan sampah namun pada kenyataannya hanya satu mobil angkutan sampah dan juga pengangkutan sampah yang seharusnya diangkut dua kali sehari tetapi hanya dilakukan sekali dalam sehari pada pukul 13.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB tetapi oleh pegawai pengelolaan sampah diangkut pada pukul 20.00 WIB dengan begitu dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya penumpukan sampah.

Maka dari itu peneliti menguraikan masalah : Bagaimana kinerja pegawai pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung di Bojonegara Zona 2A?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah, maka tujuan dalam pembahasan yang akan diajukan peneliti adalah sebagai berikut : untuk menganalisis bagaimana kinerja pegawai pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung di Bojonegara Zona 2A.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktik Ilmu Administrasi Publik yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat memberikan sumbangan penelitian, pemikiran dan wawasan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, khususnya mengenai kinerja pegawai.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini bagi lembaga menjadi salah satu saran, aspirasi dan informasi bagi Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.

b. Bagi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Pasundan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan dan dapat menambah koleksi Pustaka sebagai bahan penelitian terkait keilmuan administrasi publik, khususnya mengenai kinerja pegawai.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat diharapkan menambah informasi dan pengetahuan bagi peneliti mengenai kinerja pegawai dan memberikan kontribusi bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ini melakukan penelitian terhadap kinerja pegawai